**NASKAH**

**OPTIMALISASI SUKUK DANA HAJI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR ( ANALISIS TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPKH DALAM UU NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI)**

**Abdul Rahman Ashidiq**

Magister Hukum Bisnis Syari’ah

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : [Abdulrahmanashidiq@gmail.com](mailto:Abdulrahmanashidiq@gmail.com)

HP: 081802628796

**Abstrak**

*Di era pemerintahan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya memikirkan untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi. salah satu upaya yang di lakukan dengan membangun infrastruktur sebagai pendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk mempermudah akses lalu-lintas jalannya perekonomian di indonesia. Tentunya untuk membangun infrastrukur yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan modal yang tidak sedikit, mengahabiskan dana APBN yang cukup banyak. Oleh karenanya dibutuhkan pendukung dana dari berbagai sektor untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu peluang untuk pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengoptimalisasi sukuk dana haji indonesia sebagai modal atau instrumen pembiayaan infrastruktur.*

***Keywords:*** *Sukuk Dana Haji Indonesia, Instrumen Pembiayaan, Infrastruktur.*

1. **Pendahuluan**

Sukuk[[1]](#footnote-1) merupakan salah satu bentuk intrumen keuangan syari’ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun oleh negara. Di beberapa negara sukuk telah menjadi intrumen yang penting sebagai pembiayaan anggaran negara. Beberapa negara yang telah menjadi regular *issuer* sukuk, antara lain Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Brunei Darussalam. Kebanyakan negara yang mengadopsi sukuk, intrumen lazimnya diposisikan sebagai alat kebijakan fiksal untuk membiayai pembangunan. Kebijakan fiksal adalah suatu kebijakan terkait dengan aspek pengelolaan angaran negara. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.[[2]](#footnote-2)

Konsep keuangan berbasis syari’ah islam ( *Islamic finance*) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara islam di kawasan Timur tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syari’ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syari’ah. Selain itu juga telah dibentuk lembaga internasioanal untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan islam dan standard intrumen keuangan islam, serta didirikannya lembaga rating islam. beberapa prinsip pokok dalam trnsaksi keuangan berbasis syari’ah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil (*Profit sharing*) serta larangan terhadap *riba*, *Gharar* dan *Maysir.*[[3]](#footnote-3)

Pertumbuhan ekonomi indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur, perbaikan dalam regulasi, fiksal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian *milestones* proyek prioritas. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Setelah Di undangkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji kemudian dibetuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diamanati oleh Undang-undnag mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam hal pengelolaan dana haji khususnya dibidang pengembangan dana haji, hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk sukuk dana haji indonesia sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.

Dari uraian di atas sangatlah jelas infrastruktur merupakan salah satu penopang untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan akan terjadi pemerataan ekonomi.

Selanjutnya tujuan penulisan jurnal ini sebagai penyumbang pemikiran dari penulis dengan melihat problem yang dialamai khususnya di bidang pendanaan infrastruktur dengan memperhatikan peluang untuk pendanaan proyek infrastruktur dengan mengoptimalisasi sukuk dana haji sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.

1. **Sukuk/ Obligasi Syari’ah**

Merujukpada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari’ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil, *margin* atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[[5]](#footnote-5)

Sukuk memiliki beberapa karekteristik, antara lain:[[6]](#footnote-6)

1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu
2. Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesui dengan jenis akad yang digunkan dalam penerbitan
3. Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
4. Memerlukan adanya underlying asset penerbitan
5. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa komponen dalam kontrak sukuk, antara lain:[[7]](#footnote-7)

1. Harta

Harta yaitu setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal ( hijaazah) oleh seseorang, baik barang ataupun manfaat.

1. Akad

Dalam aktivitas sukuk melibatkan sejumlah akad antara lain, *akad ijarah, murabahah, istisna’, musyarakah, dan akad salam.*

1. Pihak yang berakat

Terdiri dari originator, badan yang mengeluarkan sukuk dan investor atau *sukukholders*

1. Cara pelaksanaan akad.
2. **Perkembangan Sukuk Negara ( SBSN ) Di Indonesia**

Sukuk Negara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diperkuat dengan adanya payung hukum Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang surat berharga syari’ah negara (SBSN) atau Undang-Undang sukuk Negara semangkin dapat meyakinkan masyarakat/para investor dalam negeri maupun investor asing untuk berinvestasi dengan membeli sukuk negara. Penerbitan sukuk negara perdana di Indonesai mulai terasa keberadaannya dengan mendapat respon yang luar bisas dari masyarakat maupun para investor. Pada tanggal 26 agustus 2008 untuk pertama kalinya sukuk negara (SBSN) diterbitkan. SBSN yang diterbitkan adalah seri IFR001 dan IFR002. Pemerintah kembali menerbitkan SBSN pada tanggal 25 februari denga seri SR001 dan disusul dengan penerbitan seri lainnya.

Jenis-jenis Sukuk Negara diantaranya:

1. SR sukuk Negara Ritel adalah sukuk Negara yang dijual kepada investor individu noninstitusi atau nonkorporsi melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 5 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat fixed, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.
2. Sukuk Valas atau global sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (yield) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (tradable). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD.
3. sukuk dana haji Indonesia ( SDHI ) adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung (*private placement*) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*/MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah *ijarah al-khadamat.* *Underlying assets* yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan (*flight*), makanan (*catering*), dan pemondokan (*housing*). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
4. IFR sukuk seri IFR adalah sukuk Negara yang di terbitkan di pasar dalam negeri dengan denominasi rupiah. IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement* dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fixed dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang Rupiah. Penerbitan perdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 dengan metode *bookbuilding* di pasar dalam negeri. Sejak tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metoda lelang yang dilaksanakan secara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri *Project Based Sukuk* (PBS) yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder
5. SPN-S surat perbendaharaan Negara syariah /SPNS atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. Penerbitan perdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement* dengan mata uang Rupiah.
6. PBS *project based* sukuk adalah sukuk yang di terbitkan dengan menggunakan proyek sebagai *underlaying asset*. SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement*, menggunakan *underlying* berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan. Penerbitannya menggunakan umumnya menggunakan struktur ijarah asset to be leased dengan menggunakan underlying asset berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.
7. Sukuk Tabungan; Sukuk Tabungan Sukuk merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih rendah (Rp2 juta). Imbal hasil bersifat tetap (fixed coupon) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Akad yang digunakan berjenis wakalah dan diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus 2016[[8]](#footnote-8)

Pada akhir tahun 2010, terdapat 10 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, SR-001 dan SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2030 dengan tingkat imbalan antara 8,70% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 5 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, dan SDHI 2014C dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2014 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 7,55%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Seri** | **Outstanding** | **Imbalan** | **Jatuh Tempo** |
| 1 | IFR0001 | Rp 2.714.700.000.000,00 | 11,8000% | 15 Agustus 2015 |
| 2 | IFR0002 | Rp 1.985.000.000.000,00 | 11,9500% | 15 Agustus 2018 |
| 3 | IFR0003 | Rp 2.632.000.000.000,00 | 9,2500% | 15 September 2015 |
| 4 | IFR0004 | Rp 550.000.000.000,00 | 9,0000% | 15 Oktober 2013 |
| 5 | IFR0005 | Rp 561.000.000.000,00 | 9,0000% | 15 Januari 2017 |
| 6 | IFR0006 | Rp 2.175.000.000.000,00 | 10,2500% | 15 Maret 2030 |
| 7 | IFR0007 | Rp 1.257.000.000.000,00 | 10,2500% | 15 Januari 2025 |
| 8 | IFR0008 | Rp 252.000.000.000,00 | 8,8000% | 15 Maret 2020 |
| 9 | SR-001 | Rp 5.556.290.000.000,00 | 12,0000% | 25 Februari 2012 |
| 10 | SR-002 | Rp 8.033.860.000.000,00 | 8,7000% | 10 Februari 2013 |
| 11 | SDHI 2012A | Rp 3.342.000.000.000,00 | 7,6100% | 03 Maret 2012 |
| 12 | SDHI 2013A | Rp 4.250.000.000.000,00 | 7,5500% | 17 Mei 2013 |
| 13 | SDHI 2014A | Rp 2.855.000.000.000,00 | 7,3600% | 09 Agustus 2014 |
| 14 | SDHI 2014B | Rp 336.000.000.000,00 | 7,3000% | 25 Agustus 2014 |
| 15 | SDHI 2014C | Rp 2.000.000.000.000,00 | 7,1300% | 07 Oktober 2014 |

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2010.[[9]](#footnote-9)

Pada akhir tahun 2011, terdapat 10 seri fixed rate SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-001, SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, SDHI 2014C, SDHI 2014D, SDHI 2021A, dan SDHI 2021B dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Seri** | **Jatuh Tempo** | **Imbalan** | **Outstanding** |
| 1 | IFR0001 | 15-Aug-15 | 11.80% | 2,714,700,000,000 |
| 2 | IFR0002 | 15-Aug-18 | 11.95% | 1,985,000,000,000 |
| 3 | IFR0003 | 15-Sep-15 | 9.25% | 2,632,000,000,000 |
| 4 | IFR0004 | 15-Oct-13 | 9.00% | 550,000,000,000 |
| 5 | IFR0005 | 15-Jan-17 | 9.00% | 1,171,000,000,000 |
| 6 | IFR0006 | 15-Mar-30 | 10.25% | 2,175,000,000,000 |
| 7 | IFR0007 | 15-Jan-25 | 10.25% | 1,547,000,000,000 |
| 8 | IFR0008 | 15-Mar-20 | 8.80% | 252,000,000,000 |
| 9 | IFR0010 | 15-Feb-36 | 10.00% | 3,710,000,000,000 |
| 10 | SR-001 | 25-Feb-12 | 12.00% | 5,556,290,000,000 |
| 11 | SR-002 | 10-Feb-13 | 8.70% | 8,033,860,000,000 |
| 12 | SR-003 | 23-Feb-14 | 8.15% | 7,341,410,000,000 |
| 13 | SDHI 2012A | 3-Mar-12 | 7.61% | 3,342,000,000,000 |
| 14 | SDHI 2013A | 17-May-13 | 7.55% | 4,250,000,000,000 |
| 15 | SDHI 2014A | 9-Aug-14 | 7.36% | 2,855,000,000,000 |
| 16 | SDHI 2014B | 25-Aug-14 | 7.30% | 336,000,000,000 |
| 17 | SDHI 2014C | 7-Oct-14 | 7.13% | 2,000,000,000,000 |
| 18 | SDHI 2014D | 11-Feb-14 | 7.85% | 6,000,000,000,000 |
| 19 | SDHI 2021A | 11-Apr-21 | 8.00% | 2,000,000,000,000 |
| 20 | SDHI 2021B | 17-Oct-21 | 7.16% | 3,000,000,000,000 |
|  | **Total** |  |  | **61,451,260,000,000** |

Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011[[10]](#footnote-10)

1. **Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur**

Setelah di undangkannya Undang-undang No. 34 tahun 2014 serta di perkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Undang-Undnag No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Haji, terbentuklah badan khusus yang bertugas mengelolah dana haji di indonesia yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji ( BPKH ), BPKH mempunyai tugas, fungsi dan wewennag sebgai berikut:

1. **Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Haji**

Pada bagian ketiga paragraf satu pasal 22 dijelaskan bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keungan haji.[[11]](#footnote-11)

1. **Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Haji**

Pada pragraf 2 pasal 23 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

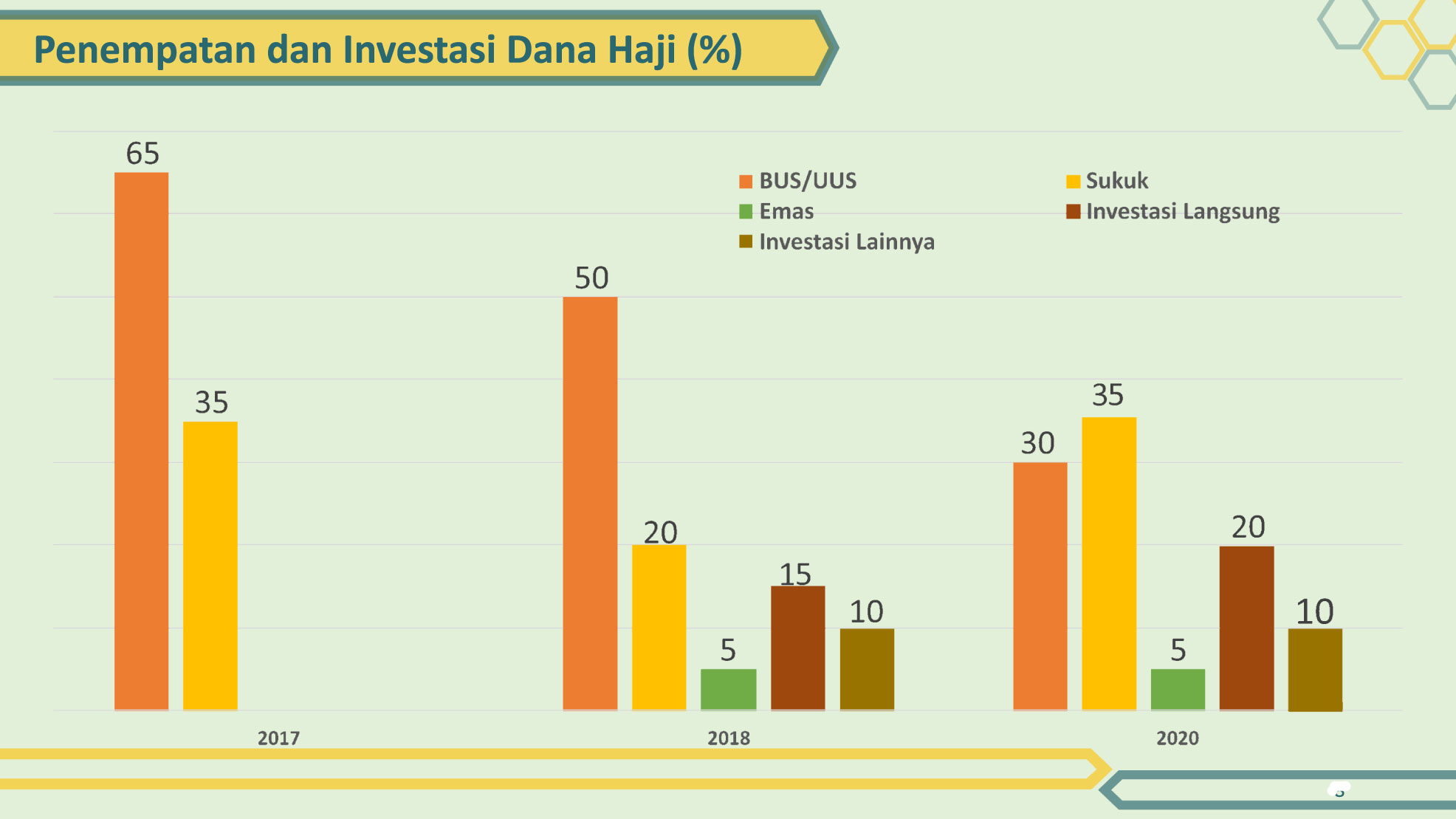
1. Perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran keuangan haji dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.[[12]](#footnote-12)
5. **Wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Haji**

Pada paragraf 3 pasal 24 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH berwenang:

1. Menempatkan dan mengivestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;dan
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.[[13]](#footnote-13)

Jika dilihat dari Undang-Undang No 34 Tahaun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji terkait tugas, fungsi dan kewenangan BPKH tidak ada batasan pada sektor apa dana haji tersebut diinvestasikan asalkan masih dalam investasi instrumen syari’ah yang aman dan bermanfaat. Dalam undang-undnag tersebut memang lebih ditekankan pada sisi keamanan, kemanfatan dan kehati-hatian. Jangan sampai dana yang diinvestasiakn hanya menargetkan hasil yang sangat tinggi namun tidak ada kemanaan yang terjamin. Juga harus memikirkan kepentingan jamaah haji untuk memperoleh kemanfatan tambahan atas dananya yang tersimpan sekian lama harus memperoleh prioritas bukan hanya sekedar keuntungan investasi semata.

Berikut ini data penempatan dan investasi dan haji 2017 dan rencana pengelolan dana haji 2018-2022[[14]](#footnote-14)



Dari data grafik diatas dapat dilihat rencana untuk pengelolaan dana haji yang akan lebih banyak diinvestasikan ke Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta sukuk . Penempatan dan haji di perbankan syariah memang bisa memberikan dapak positif bagi perbankan syariah karena perbankan syariah memperoleh dana yang jumlahnya besar sehingga dapat mengembangkan fingsi intermediasinya terhadap sektor riil. Namun dana haji tersebut tidak mungkin semunaya ditempatkan pada perbankan syariah karena bagaimanapun perbankan syariah mempunyai keterbatasan untuk mengelola dan haji tersebut. Sehingga dibutuhkan sektor lain sebagai sarana invesatasi dana haji yang dirasa aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini yaitu di investasikan dalam bentuk sukuk negara.

Jika ditinjau penempatan dan haji ke dalam SBSN sebenarnya lebih didasarkan pada kemanan dalam berinvestasi dan keuntungan berupa imbalan dari SBSN. Dalam praktek selama ini penempatan dana haji di dalam SBSN menggunakan SDHI yang bersifat *Private placement* ( penempatan sendiri ). Hal ini memberikan keuntungan bagi kementerian agama dalam menentukan tenor SDHI yang disesuaikan dengan rencana pemanfatan dana haji tersebut. Namun SDHI merupakan instrumen non-*tradeable* ( tidak dapat diperdagangkan ) sehingga tidak bisa di *redeem* setiap saat. Jika melihat undang-undang No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH) dengan mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang BPKH yaitu diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji sebenarnya menjadi peluang untuk menginvestasikan dana haji tidak hanya kedalam SBSN melalui SDHI, melainkan bisa dimasukkan kedalam sukuk negara seri PBS yang itu lebih bersifat *tradeable* ( dapat diperdagangkan ). Dengan menggunakan intstrumen yang *tradeable* maka pengelolaan keuangan haji dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di *redeem* setiap saat melalui pasar sekunder. Disisi lain, ketika dan haji tersebut ditempatkan dalam sukuk PBS maka akan membantu pembangunan infrastruktur yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dibuka dan pemerataan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Efek positif yang lain juga memberikan imbalan yang cukup kompetitif yang hasil imbalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiatas layanan haji sehingga masyarakat indonesia yang melaksanakan haji lebih nyaman dan aman dalam menjalankan ibadah haji.

1. **Penutup**

Pembangunan Infrastruktur memagang peranan yang sangat penting untuk membangun perekonamian nasioanal sekaligus bisa menjadi solusi untuk menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sukuk Dana Haji Indonesia ( SDHI ), merupakan salah satu intstrumen pembiayaan pembangunan insfrastruktur, karena sukuk memiliki proyek yang jelas dalam operasionalisainya. Oleh karena itu, perlunya ada kerja sama antara pemerintah dengan badan pengelolah keungan haji (BPKH), dalam rangka penerbitan sukuk dana haji indonesia dengan mengoptimalka tugas, fungsi dan wewenang BPKH yang telah diberi keluasan untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana haji dalam Undang-undnag No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

Dana haji yang dikelolah oleh Badan Pengelolah Keungan Haji tidak hanya sebatas di investasikan kedalam SBSN yang berupa SDHI yang sifatnya tidak dapat diperdagangkan tetapi sebetulnya bisa di investasikan kedalam SBSN yang berupa PBS yang itu sifatnya lebih *Tradeable* ( dapat diperdagangkan).

**Daftar Pustaka**

Derektorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id) tanggal 24 oktober 2018.

Fahmi Salim, *Konsep Dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiksal Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Khairunnisa Musari, *sukuk untuk fiscal Sustainability,(* Majalah Sharing, Edisi 35, 2009).

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656, di akses pada tanggal 26 oktober 2018.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> tanggal 25 oktober 2018.

Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami & membedah obligasi pada perbankan syari’ah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan\_Pertanggungjawaban.../Laporan\_Pertanggu...lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018.

www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan\_Pertanggungjawaban.../Laporan\_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018.

1. Menurut bahasa sukuk adalah akar kata dari bahasa arab”*sakk*”, jamaknya “*sukuk*” yang berarti memukul atau membentur, dan juga bisa bermakna pencetakan atau menempa. Istilah sakk bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak, obligasi dan uang. Sukuk didefinisikan sebagi suatu dokumen sah yang menjadikan bukti penyerahan modal tehadap kepemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Lihat Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami & membedah obligasi pada perbankan syari’ah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 92-93 [↑](#footnote-ref-1)
2. Khairunnisa Musari, *sukuk untuk fiscal Sustainability,(* Majalah Sharing, Edisi 35, 2009), Hal 22*.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Derektorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id) tanggal 24 oktober 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/> tanggal 25 oktober 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 87 [↑](#footnote-ref-5)
6. Fahmi Salim, *Konsep Dan Aplikasi Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiksal Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 hlm 21 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: memahami & membedah obligasi pada perbankan syari’ah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 101-102. [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656, di akses pada tanggal 26 oktober 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan\_Pertanggungjawaban.../Laporan\_Pertanggu...lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018. [↑](#footnote-ref-9)
10. www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan\_Pertanggungjawaban.../Laporan\_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pasal 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 23. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 24. [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://bpkh.go.id/> di akses tanggal 26 oktober tahun 2018. [↑](#footnote-ref-14)